



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia Melalui
***The New Colombo Plan* Tahun 2014-2019**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Hubungan Internasional

Oleh

Steffanie Fiorentina

2017330171

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia Melalui
***The New Colombo Plan* Tahun 2014-2019**

Skripsi

Oleh

Steffanie Fiorentina

2017330171

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Steffanie Fiorentina
Nomor Pokok : 2017330171
Judul : Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia Melalui *The New Colombo Plan* Tahun 2014-2019

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 22 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Jessica Martha, S.IP., M. I. Pol.

: 

Sekretaris

Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.

: 

Anggota

Sapta Dwikardana, Ph. D.

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Steffanie Fiorentina
NPM : 2017330171
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia
Melalui *The New Colombo Plan* Tahun 2014-2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Juli 2021



Steffanie Fiorentina

2017330171

ABSTRAK

Nama : Steffanie Fiorentina

NPM : 2017330171

Judul : Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia Melalui *The New Colombo Plan* Tahun 2014-2019

Dinamika pasang surut antara Australia dan Indonesia mendorong Australia membentuk kebijakan untuk memperbaiki dan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Sebagai upaya untuk membentuk citra positif dan mempererat kerjasama dalam beberapa sektor, Australia melakukan upaya diplomasi publik terhadap Indonesia melalui sektor pendidikan oleh *The New Colombo Plan* yang merupakan gagasan Julie Bishop pada tahun 2014. *The New Colombo Plan* menyediakan beasiswa bagi pelajar Australia untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan di beberapa universitas di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, *The New Colombo Plan* juga bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah AIYA dan ACICIS yang bertindak sebagai wadah bagi para peserta untuk saling berinteraksi dengan pelajar Indonesia dan mengenal kebudayaan masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung kegiatan *The New Colombo Plan* di Indonesia. Penelitian ini menerapkan konsep diplomasi publik, pendidikan internasional, serta diplomasi multijalur untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana upaya diplomasi publik Australia terhadap Indonesia melalui *The New Colombo Plan* tahun 2014-2019”. Berdasarkan konsep tersebut, diperoleh hasil bahwa melalui *The New Colombo Plan*, Indonesia menjadi negara yang populer di kalangan pelajar Australia dan paling diminati sebagai destinasi pertukaran pelajar. Aspek kebudayaan yang kaya juga menjadi faktor pendukung tingginya minat peserta terhadap Indonesia. Untuk mempromosikan kegiatan serta program yang dilakukan, media turut berperan sebagai sarana informasi serta wadah untuk saling memberikan respon positif terhadap kedua negara.

Kata kunci: *The New Colombo Plan*, Australia, Indonesia, Diplomasi Publik

ABSTRACT

Nama : Steffanie Fiorentina

NPM : 2017330171

Judul : Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia Melalui *The New Colombo Plan* Tahun 2014-2019

The ups and downs dynamics between Australia and Indonesia encourage Australia to form an interational policies to improve and strengthen bilateral relations between the two countries. As an effort to form a positive image and strengthen cooperation in several sectors, Australia has undertaken public diplomacy efforts towards Indonesia through the education sector by The New Colombo Plan as proposed by Prime Minister Julie Bishop in 2014. The New Colombo Plan provides scholarships for Australian students to participate in education and training programs at several universities in Indonesia. In its implementation, The New Colombo Plan also collaborates with non-governmental organizations, AIYA and ACICIS, that act as a forum for participants to interact with Indonesian students and get to know each other's culture. In this case, the Australian government through the Department of Foreign Affairs cooperates with the Indonesian government to support the activities of The New Colombo Plan in Indonesia. This research applies the concept of public diplomacy, international education, and multi-track diplomacy to help answer the research question "How is Australia's public diplomacy efforts towards Indonesia through The New Colombo Plan 2014-2019". Based on this concept, it was found that through The New Colombo Plan, Indonesia became a popular country among Australian students and the most popular as a student exchange destination. The rich cultural aspect is also a contributing factor to the high interest of participants in Indonesia. To promote the activities and programs carried out, the media also plays a role as a means of information as well as a forum to give each other positive responses to the two countries.

Keywords: *The New Colombo Plan, Australia, Indonesia, Public Diplomacy*

KATA PENGANTAR

Hubungan kerjasama bilateral Australia-Indonesia yang telah terjalin cukup lama kerap diwarnai dinamika pasang surut dalam perjalanannya. Adanya faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan kedua negara menemui ketidaksepahaman tidak semerta-merta membuat hubungan keduanya merenggang atau terputus. Sebaliknya kedua negara berupaya untuk semakin mempererat hubungan bilateral dengan memperluas sektor kerjasama dengan menerapkan konsep diplomasi publik, salah satunya melalui pendidikan yang merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk melihat upaya diplomasi oleh Australia terhadap Indonesia yang dilakukan oleh pelajar sebagai aktor untuk mempererat hubungan kedua negara.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Selain itu juga penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi maupun rujukan bagi tulisan-tulisan berikutnya yang akan membahas mengenai diplomasi publik khususnya melalui sektor pendidikan Australia dan Indonesia.

Bandung, 7 Juli 2021

Steffanie Fiorentina

Ucapan Terima Kasih

To:

- Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan menguatkan penulis selama proses penulisan skripsi.
- Papa, Mama, dan Jonathan yang selalu mendukung melalui doa dan dukungan kepada penulis dari awal permulaan masa kuliah serta mendampingi dan menemani penulis sampai waktu sidang berlangsung.
- Mba Suke selaku dosen pembimbing yang membantu penulis dalam menyusun skripsi dari masa rancangan penelitian hingga penulisan skripsi dan tetap memberikan koreksi sehingga skripsi dapat selesai tepat waktu.
- *Uri supportive dongsaeng, my dear bestie, my moral support, my ASMR queen, adik iparku di halu universe, Chintya Tjusanto. You know I'm not good with words but I'm thankful for your presence and for everything you've done for me.*
- *My safe place, my rock, the significant other, Benny, even though we were separated by 5,798 kms from each other but your never ends support never stops and I'm forever grateful for that. Thank you for being there during my breakdown time and always believe in me when I'm doubting myself.*
- To Alya dan Erma panggung komedi ku, *my supportive friends*, temen berantem, temen panik, my emergency contact (hehehe). Ga nyangka bisa sedeket ini dan dapet support dari kalian dan keluhan selama skripsi. Terima kasih karena selalu ada jadi hiburan di masa-masa panik dan stress, dari kalian juga gue tau kalo *God and the universe really works in mysterious way, luvss both of you.*

- Bimbingan *buddy*, Cilla dan Dini yang selalu sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan karena revisi dan masa-masa sebelum sidang sampai sidang selesai.
- Adik jauhku, Amalya Natya, *thankyou for your endless support and also for always being there for me, words cannot describe how I'm grateful for your presence and calming words. I also would to thank sejinter for bringing me to Natya.*
- *Lastly, for myself, thank you and congratulations because you made it and you survived.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.2.1 Pembatasan Masalah	12
1.2.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Kajian Literatur	14
1.5 Kerangka Pemikiran	20
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	27
1.6.1 Metode Penelitian	27
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	29
1.7 Sistematika Pembahasan	29
BAB II HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA DENGAN INDONESIA MELALUI <i>THE NEW COLOMBO PLAN</i>	33
2.1 Kerjasama Australia-Indonesia pada era Joko Widodo (2014-2019) dalam Berbagai Bidang	33
2.2 <i>The New Colombo Plan</i>	43

2.2.1 Sejarah <i>Colombo Plan</i>	44
2.2.2 <i>The Old Colombo Plan</i> dan <i>The New Colombo Plan</i>	47
2.2.3 Tujuan, Pendekatan, dan Sasaran.....	49
2.2.4 Negara dan Mitra Internasional	51
2.2.5 Program dan Kegiatan Berjangka <i>The New Colombo Plan</i>	51
BAB III UPAYA-UPAYA <i>THE NEW COLOMBO PLAN</i> DALAM MENDUKUNG DIPLOMASI PUBLIK AUSTRALIA DI INDONESIA	54
3.1 Menyelenggarakan Program Beasiswa Untuk Pelajar Australia	59
3.2 Melakukan Kerjasama dengan Organisasi Non-Pemerintah (ACICIS dan AIYA)	65
3.2.1 Program Mobilitas Mahasiswa Melalui ACICIS (<i>Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies</i>	66
3.2.2 Program Mobilitas Mahasiswa Melalui AIYA (<i>Australia- Indonesia Youth Association</i>)	68
3.3 Mengadakan Program Pelatihan Bagi Peserta <i>The New Colombo Plan</i> ...	72
BAB IV KESIMPULAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Diplomasi Multijalur	22
Gambar 3.1 Peserta <i>The New Colombo Plan</i> di Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016	54
Gambar 3.2 Menteri Pendidikan Christopher Pyne di Acara INDO-Fest.....	58
Gambar 3.3 Peserta <i>The New Colombo Plan</i> 2019 Bersama Mahasiswa Indonesia	66
Gambar 3.4 Anggota AIYA Penerima Beasiswa <i>The New Colombo Plan</i> Bersama Julie Bishop di Kedutaan Besar Australia Jakarta	68
Gambar 3.5 Perwakilan ACICIS dan Universitas Katolik Parahyangan Menandatangani MoA	70
Gambar 3.6 Pelajar Australia Dalam Program CADPP Tahun 2017	73
Gambar 3.7 Peserta <i>The New Colombo Plan</i> di Yogyakarta.....	75

DAFTAR SINGKATAN

ACICIS	: <i>Australia Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies</i>
ADF	: <i>Australia Defence Force</i>
AIHSP	: <i>Australia Indonesia Health Security Partnership</i>
AIYA	: <i>Australia Indonesia Youth Association</i>
ALM	: <i>Annual Leaders Meeting</i>
APO	: <i>Academic Program Officer</i>
BNPT	: <i>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</i>
CADPP	: <i>Creative Arts and Design Professional Practicum</i>
CMM	: <i>Consulative Committee</i>
DFAT	: <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i>
HADR	: <i>Humanitarian Aid and Disaster Relief</i>
IA-CEPA	: <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
IGO	: <i>International Government Organizations</i>
MNC	: <i>Multinational Corporation</i>

NCP : *New Colombo Plan*

NGO : *Non-Governmental Organization*

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

TNI : Tentara Nasional Indonesia

UGM : Universitas Gadjah Mada

UNGOC : *United Nations Good Offices Commission*

UNPAR : Universitas Katolik Parahyangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan cara untuk membangun hubungan baik melalui kerjasama dengan negara-negara lain disekitarnya baik melalui hubungan dagang atau ekonomi, pertukaran ide dan nilai, serta pengaruh yang dimiliki terhadap negara lain. Untuk dapat menciptakan hubungan yang baik, diperlukan aktivitas diplomasi yang dilakukan secara intensif dengan tujuan bukan hanya mencapai kepentingan nasional negara bersangkutan tetapi juga memperbaiki atau membangun citra yang positif. Selain melakukan aktivitas diplomasi secara intensif, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kelancaran kerjasama yang dibangun yaitu posisi serta kedudukan negara tersebut di kancah internasional. Kegiatan diplomasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melalui aktivitas penyebaran nilai-nilai, budaya serta pengaruh yang dikenal sebagai diplomasi publik. Apabila melihat fokus diplomasi publik yang menggunakan strategi penyebaran nilai dan pengaruh yang dimiliki oleh suatu negara, maka diplomasi publik dikategorikan sebagai bentuk *soft power* karena cara kerjanya yang tidak melibatkan tindakan koersif maupun penggunaan senjata kekerasan untuk menunjukkan eksistensi serta kemampuan yang dimiliki negara. Dalam pengertiannya, *soft power* didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan tujuan mencapai kepentingan negara melalui kebudayaan, ideologi, serta bentuk kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif.

Kekuatan *soft power* yang dimiliki oleh negara berada pada nilai-nilai, kekayaan budaya, serta kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam pemerintahan negara tersebut. Oleh karena itu, diplomasi publik pada masa kini memegang peran yang semakin penting sebagai alat untuk mencapai kepentingan suatu negara tanpa menggunakan kekuatan militer yang dapat menyebabkan dampak lebih besar seperti perang misalnya.

Bagi Australia, diplomasi tidak dipandang sebagai ajang untuk saling beradu popularitas antar negara, akan tetapi sebagai bentuk pemahaman tentang bagaimana negara lain memandang Australia dalam upaya untuk menyebarkan pengaruh serta potensi yang dimiliki. Australia membentuk kebijakan serta politik luar negerinya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat karena pada pemahamannya, Australia tidak mengartikan identitas nasionalnya berdasarkan ras serta agama yang ada di masyarakat melainkan melalui penyebaran nilai-nilai serta kebebasan bernegara yang dimiliki oleh masyarakatnya.¹ Australia dinilai sebagai salah satu negara terbaik dilihat dari tingkat kesejahteraan serta kualitas sistem pendidikan yang baik dari segi internasional.² Berdasarkan kondisi geografisnya, benua Australia merupakan negara Barat yang berada dalam lingkup kawasan Asia dengan populasi yang mayoritas menganut budaya Timur dengan perbedaan dari segi ideologi serta kebudayaan yang

¹ 2017 Foreign Policy White Paper, "Foundation for Success," *Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade*, 2017, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/pdf/2017-foreign-policy-white-paper.pdf> diakses pada 26 September 2020

² "Australia Country Profile," *BBC News*, September 2018, <https://www.bbc.com/news/world-asia-15674351> diakses pada 26 September 2020,

beragam.³ Meskipun kondisi iklim Australia tergolong sebagai benua terkering karena intensitas curah hujan yang rendah setiap tahunnya, cuaca yang dingin tidak menyurutkan semangat para pelajar bahkan dari mancanegara untuk tetap mengenyam pendidikan disini.⁴ Selain itu, dari segi destinasi wisata yang dimiliki oleh Australia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Australia.

Dipandang dari nilai-nilai *plus* yang ditawarkan oleh Australia kepada dunia internasional, maka seluruh kelancaran akses masuk menuju Australia tidak lepas dari peran kerjasama yang dilakukan baik dari segi pariwisata maupun ekonomi dengan negara-negara lain di sekitar Australia. Akan tetapi, tidak dipungkiri apabila dalam upaya membangun hubungan diplomatiknya, Australia tidak lepas dari konflik yang terjadi dengan negara tetangga. Sebagai contoh, pada tahun 2018 ketika Indonesia dan Australia mengalami ketegangan akibat rencana Australia yang ingin memindahkan kedutaan di Israel ke Yerusalem. Rencana ini menuai reaksi dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi yang menegaskan bahwa Australia akan menyalahi aturan internasional dan dapat mengancam stabilitas keamanan dunia.⁵ Hal ini menjadi penting karena secara tidak langsung, Yerusalem diakui sebagai ibukota Israel oleh

³ Alexandra Oliver and Russell Trood, *Public Diplomacy and Australia's Middle Power Strategy in East Asia* (2015)

⁴ "Mengenal Lebih Dekat Australia," *PPI Australia*, <http://www.ppi-australia.org/student-guide/mengenal-lebih-dekat-australia/> diakses pada 26 September 2020

⁵ "Panas Dingin Relasi Indonesia-Australia," *CNN Indonesia*, 18 Oktober 2018, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181018152127-106-339539/panas-dingin-relasi-indonesia-australia> diakses pada 26 September 2020,

Australia yang padahal kondisi Yerusalem masih dalam sengketa Israel dan Palestina yang keduanya memiliki kepentingan ingin berebut ibukota.⁶ Tentu saja dalam perjalanannya bukan hanya Indonesia saja yang pernah berselisih dengan Australia, tetapi negara-negara lain seperti Tiongkok dalam hal politik luar negeri dimana keduanya merupakan rekan investasi yang berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam situasi politik yang tidak menentu.⁷

Hubungan antar negara tidak bisa selalu hanya berkaitan dengan konflik atau perselisihan paham dan ideologi, akan tetapi diperlukan hubungan baik agar permasalahan maupun kepentingan nasional dapat tercapai yang kemudian akan berdampak pada keamanan serta stabilitas nasional. Dalam hal ini, Australia menginisiasikan program yang diberi nama “*The New Colombo Plan*” yang sebelumnya bernama “*The Colombo Plan*”. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk memperluas serta memperkuat pengaruh Australia di kawasan Asia Pasifik yang menjadikan mobilitas pelajar sebagai inti dari *New Colombo Plan*.⁸ Dengan adanya *The New Colombo Plan*, terhitung sejak program ini diperbarui tahun 2014 sebanyak 1300 pelajar yang berasal dari Australia berkesempatan untuk mengenyam pendidikan

⁶ *Ibid.*

⁷ Dr. Stephen Sherlock, “Australia’s Relations with China: What’s the Problem,” *Parliament of Australia*, https://www.aph.gov.au/sitecore/content/Home/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/CIB9697/97cib23 diakses pada 26 September 2020,

⁸ Caitlin Byrne, “Australia’s New Colombo Plan: Enhancing regional soft power through student mobility,” *International Journal* 0(0) 1-22 (2016)

di negara-negara Asia Pasifik yaitu Indonesia, Singapura, Jepang dan Hongkong.⁹ Program pendidikan ini diperuntukan bagi pelajar Australia sebagai perpanjangan tangan negara untuk menyebarkan nilai keberagaman yang ada di Australia.

The New Colombo Plan menggunakan strategi *people-to-people diplomacy* sebagai cara pendekatan untuk menjalankan programnya. Metode ini merupakan komunikasi dua arah atau yang lebih dikenal dengan negosiasi baik secara formal maupun informal. Dengan menggunakan metode *people-to-people diplomacy*, biaya yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah cenderung akan lebih kecil dibandingkan dengan metode negosiasi yang seringkali bersifat formal atau kaku. Manusia sebagai alat utamanya tentu akan memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan terhadap masyarakat internasional karena interaksi yang dibangun antar manusia cenderung lebih cepat dan juga seperti yang diketahui bahwa penyebaran informasi idealnya dilakukan secara langsung dengan interaksi antar manusia dibandingkan dengan menggunakan metode lain sebagai media perantaranya.¹⁰ Bentuk interaksi *people-to-people diplomacy* dapat berupa obrolan, interaksi pada media sosial, atau pertukaran berita. Apabila proses negosiasi dilakukan secara intensif maka akan membentuk pandangan serta tercapainya kepentingan nasional.

⁹ “About the New Colombo Plan: What is the New Colombo Plan,” Australia Department of Foreign Affairs and Trade, https://www.dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan/about/Pages/about__diakses pada 26 September 2020

¹⁰ Tim Lindsey and Dave McRae, *Indonesia and Australia in the Asian Century* (North America: Hart, 2018) diakses pada 26 September 2020

Strategi diplomasi publik yang dilakukan oleh Australia melalui *The New Colombo Plan* dapat dikatakan sebagai strategi yang bagus dikarenakan fokus utama dari program inisiasi yang membuka akses bagi para pelajar untuk dapat menambah ilmu serta keterampilan diluar negaranya sendiri. Seperti yang diketahui juga bahwa pendidikan merupakan komponen yang penting bagi seseorang dan sebagian besar para pelajar tentu ingin dapat berkesempatan untuk mengenyam pendidikan diluar negeri karena sekaligus dapat memperoleh keterampilan dan pengalaman yang lebih luas selain ilmu pendidikan. *The New Colombo Plan* dalam eksekusinya juga menemukan tantangan yang mana pada awalnya hanya berupa konsep namun perlahan dikembangkan menjadi sebuah program membuat kendala yang ditemui berupa kurangnya kesiapan pemerintah Australia dalam memperhitungkan apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk menjalankan program tersebut.¹¹

Dengan adanya *The New Colombo Plan* sebagai strategi diplomasi publik yang baru, pemerintah Australia juga secara langsung ‘berinvestasi’ pada pergerakan mobilitas pelajar dengan cara memberikan dukungan secara penuh dalam bentuk program-program baru yang dikembangkan setiap periodenya, memberikan donor pada universitas yang bekerjasama serta beasiswa tambahan bagi para pelajar.¹² Bentuk dukungan dari pemerintah Australia secara langsung dapat dilihat dan dirasakan

¹¹ Caitlin Byrne, “Australia’s New Colombo Plan: Enhancing regional soft power through student mobility,” *International Journal* 0(0) 1-22 (2016)

¹² “About the New Colombo Plan,” *Australia Department of Foreign Affairs and Trade*, <https://www.dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan/about/Pages/about>

contohnya oleh para pelajar dari Indonesia dikarenakan upaya diplomasi publik Australia yang terasa nyata dengan banyaknya peluang beasiswa yang dibuka oleh Australia bagi pelajar Indonesia contohnya dari Universitas Indonesia untuk belajar atau menempuh program *joint degree* dengan *University of Queensland*. Kepentingan nasional Australia yang ingin dicapai melalui *The New Colombo Plan* adalah untuk memberikan pengaruh serta meyakinkan negara-negara di kawasan sekitar Australia bahwa Australia merupakan negara yang menganut kebudayaan Eropa yang mendominasi dan memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pengaruh berupa nilai serta ideologi bagi kawasan. Dengan tingginya minat para pelajar untuk dapat menjadi bagian dari *The New Colombo Plan*, pemerintah Australia tentu memegang peranan penting dalam hal bagaimana untuk dapat mencapai kepentingannya tetapi juga mengambil bagian untuk turut bertanggung jawab menjaga keamanan dan kestabilan negara kawasan dengan banyaknya jumlah pelajar yang di alokasikan kepada negara-negara diluar Australia.

Berdasarkan latar belakang dari dipilihnya topik ini sebagai bahan untuk melakukan penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa topik ini penting untuk dibahas karena dapat mengkaji lebih lanjut lagi tentang bagaimana strategi diplomasi publik yang dilakukan Australia melalui program *The New Colombo Plan* melalui mobilitas siswa sebagai alat utama dari berjalannya program yang diinisiasikan oleh pemerintah Australia. Dikarenakan seperti yang diketahui, pendidikan merupakan

komponen yang penting dan keputusan Australia menggunakan pendidikan sebagai jalur diplomasi publiknya dirasa tepat untuk dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Kurang lebih satu dekade sebelumnya yakni pada tahun 2006, Australia berhasil mendapat predikat sebagai negara dengan gelar “*The Most Marketable Nation*” berdasarkan keberhasilannya membangun citra positif menurut *Nations Brand Index*.¹³ Hal ini juga yang mendorong Australia untuk melakukan diplomasi publiknya melalui program *The New Colombo Plan* dengan menjadikan pelajar sebagai alat diplomasi utama untuk mengadopsi dan bertukar nilai-nilai kebudayaan khususnya dengan masyarakat kawasan Asia Pasifik.

Colombo Plan bermula sebagai organisasi kerjasama Australia pada tahun 1951 bersama negara di kawasan Asia-Pasifik bernama “*Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and the Pacific*” dengan tujuan awal yaitu mendukung pengembangan dan pembangunan ekonomi yang seiring berjalannya waktu semakin mengerucut pada agenda pendidikan.¹⁴ Salah satu politikus Australia, Sir Percy Spender bahkan menyampaikan bahwa mobilitas pelajar, peneliti, dan

¹³ “Australia Public Diplomacy,” [publicdiplomacy.wikia.org](https://publicdiplomacy.wikia.org/wiki/Australia), <https://publicdiplomacy.wikia.org/wiki/Australia>

¹⁴ “Colombo Plan,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, April 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/139/halaman_list_lainnya/colombo-plan

pengamat yang berasal dari Asia ke Australia telah membawa interaksi yang sifatnya langsung, personal, dan intens karena intensitas interaksinya yang terjadi dalam sehari-hari. Mereka kemudian akan berbaur dalam berbagai tempat dan situasi seperti pekerjaan, dalam tempat tinggal pribadi, olahraga, komunitas dan perkumpulan sosial, atau berbagai jenis kegiatan komunitas yang kemudian akan memberikan pengaruh pada nilai etika kehidupan sosial.¹⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa *Colombo Plan* melakukan upaya diplomasi publik dengan melalui interaksi antara para pelajar di berbagai tempat dan situasi dengan tujuan utamanya untuk bertukar nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Colombo Plan yang bermula sebagai program yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara negara kawasan Asia Pasifik dan Australia dengan fokus pada pengembangan sosial ekonomi berkembang seiring dengan berjalannya waktu sejak diresmikan pada tahun 1951. Agenda program semakin berkembang hingga sektor pelatihan dan pendidikan yang mendorong Australia sebagai salah satu negara contributor menawarkan program beasiswa dan pelatihan bagi para pelajar dari negara partisipan *Colombo Plan* dengan jumlah mencapai 20.000 siswa terhitung tahun 1980.¹⁶ Melalui fasilitas pelatihan dan pendidikan yang disediakan oleh Australia, para

¹⁵ Alex Auletta, *A Retrospective View of The Colombo Plan: Government policy, departmental administration and overseas students* (Australia: Monash Centre for Research International Education, August 3, 2010).

¹⁶ "The Colombo Plan," *Destination Australia*, <https://www.destinationaustralia.gov.au/stories/work-play/colombo-plan>

pelajar berhasil membawa nilai-nilai kebudayaan Australia ketika kembali ke negara asal sebagai contoh bentuk diplomasi publik yang dilakukan oleh Australia. Melalui inisiasi tersebut, *Colombo Plan* yang pada waktu itu berhasil membawa ribuan pelajar untuk saling bertukar pengalaman menjadikan *Colombo Plan* sebagai “*significant initiative that brought Australia and Asia closer*”.¹⁷ Program *Colombo Plan* berubah menjadi *New Colombo Plan* dengan tujuan mendorong arus dua arah antara Australia dan Asia dengan agenda kebijakan luar negeri yang lebih baru. Sejak diresmikan menjadi *New Colombo Plan* pada tahun 2014 oleh Julie Bishop, perbedaan signifikan terdapat pada peran aktor yang terlibat serta hasil akhir yang diinginkan yakni tidak hanya memberikan dampak pada pendidikan dan pengalaman bagi pelajar tetapi juga menjalin dan membentuk kerjasama antar institusi, operasional, mobilitas regional, serta sebagai sarana diplomasi publik, sehingga dampak yang dihasilkan dapat terlihat dalam aspek individu, insitusi, nasional, bahkan regional.¹⁸

Dengan terjalinnya hubungan kerjasama melalui program *New Colombo Plan* antara Australia dan Asia, kepentingan nasional Australia yang ingin menyebarkan nilai-nilai serta pengaruhnya terhadap kawasan Asia-Pasifik terbentuk melalui program ini. Australia ingin menjalin kerjasama yang lebih erat bukan hanya dalam bidang pendidikan saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi serta keamanan regional dan

¹⁷ DR. Mark Rahimi, *New Colombo Plan: A Review of Research and Implications for Practice* (Australia: Deakin University, October 2018).

¹⁸ *Ibid.*

people-to-people links untuk semakin mempererat hubungan.¹⁹ Selain itu, apabila terjadi peningkatan jumlah pelajar peserta *New Colombo Plan* setiap tahunnya pada negara-negara partner Australia tentu akan memberikan dampak positif bagi negara *host countries*. Hal positif yang dimaksud yaitu para pelajar internasional dapat memberikan pengaruh dari segi budaya dimana mereka ditempatkan sehingga terjadi pertukaran budaya atau penyerapan nilai-nilai baru dan juga dapat berkontribusi dalam bidang ekonomi. Melihat tujuan utama dari *New Colombo Plan* yang ingin menyebarkan pengaruh dan bertukar nilai-nilai antara pelajar Australia dan pelajar dari kawasan Asia Pasifik, para pelajar yang telah menjadi alumni program ini menjadi lebih terbuka terhadap nilai dan kebudayaan dari kawasan lain karena pengalaman yang mereka terima selama menjadi peserta *New Colombo Plan*.

Berdasarkan kerjasama yang dibangun oleh Australia dengan menjadikan pelajar sebagai aktor utama diplomasi publik *New Colombo Plan*, Australia telah menjalankan agenda kebijakan luar negerinya seperti yang tercantum dalam “*Australia 2017 Foreign Policy White Paper*” yaitu menjadikan Asia Pasifik sebagai prioritas utama dalam membangun hubungan bilateral.²⁰ Oleh karena itu, Australia tetap melanjutkan agenda diplomasi publiknya melalui *The New Colombo Plan* selama rentang waktu dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2014 hingga 2019. Kemudian yang

¹⁹ 2017 Foreign Policy White Paper, “Foundation for Success,” *Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade*, 2017.
<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/pdf/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>

²⁰ *Ibid.*

akan dikaji pada bagian isi selanjutnya dari penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia melalui *New Colombo Plan* dalam rentang waktu tersebut untuk mengupayakan kebijakan luar negerinya yang ingin memperkuat pengaruh dan mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia melalui pendidikan internasional sebagai program diplomasi publiknya dan pelajar sebagai aktor diplomasi.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, dalam melakukan penelitian ini penulis akan memfokuskan pada program-program pendidikan serta mobilitas yang melibatkan pelajar dari kedua negara sebagai aktor dalam diplomasi *people-to-people* yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia dalam *The New Colombo Plan* (NCP). Pendidikan internasional dan mobilitas pelajar dipilih sebagai objek penelitian karena masyarakat khususnya pelajar merupakan salah satu aktor diplomasi publik yang dapat menyebarkan nilai-nilai serta membentuk opini mengenai kebudayaan serta metode belajar melalui interaksi yang dilakukan secara langsung dengan masyarakat. Dalam *The New Colombo Plan* juga terdapat pertukaran budaya yang merupakan instrumen diplomasi publik untuk mempererat hubungan serta membentuk citra dan membantu Australia mencapai kepentingan terhadap Indonesia. Fokus rentang waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2014 hingga 2019. Pertimbangan ini diambil karena 2014 merupakan tahun awal nama *The New Colombo Plan* diresmikan oleh Julie Bishop setelah adanya perluasan program hingga mencakup bidang pendidikan

dan 2019 merupakan tahun terakhir peserta *The New Colombo Plan* dilaksanakan dimana pelajar masih berkesempatan belajar di negara destinasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sebelum adanya pandemi di tahun 2020. Sejak awal diresmikannya *The New Colombo Plan* tahun 2014 juga Indonesia merupakan negara destinasi yang menerima anggaran paling tinggi untuk mendukung jalannya program dibandingkan dengan empat negara lainnya oleh Australia yakni sebesar AUD92.000.²¹

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah dengan pertanyaan penelitian,

“Bagaimana upaya-upaya *The New Colombo Plan* dalam mendukung diplomasi publik Australia di Indonesia tahun 2014-2019?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program *The New Colombo Plan* sebagai bentuk upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019.

²¹ “Mobility Grant FAQ-2014 Pilot Phase,” *Australia DFAT*, diakses pada 27 Maret 2021, <https://www.dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan/mobility-program/Pages/mobility-grants-faq-2014-pilot-phase>

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dengan melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa maupun pengkaji ilmu hubungan internasional yang melakukan penelitian serupa mengenai bentuk diplomasi publik Australia maupun *The New Colombo Plan*.

1.4 Kajian Literatur

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa artikel jurnal sebagai acuan atau gambaran penelitian.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Caitlin Byrne dan Rebecca Hall dalam tulisannya yang berjudul *International Education as Public Diplomacy* berpendapat bahwa pendidikan internasional dapat berkontribusi sebagai salah satu kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dan tentu saja sebagai alat diplomasi publik dan *soft power* suatu negara. Pendidikan internasional dapat digunakan sebagai instrument diplomasi publik dikarenakan sistem dan kinerja pendidikan internasional yang melibatkan kaum pelajar untuk memperoleh edukasi antar wilayah dipandang sebagai sebuah budaya, perilaku, dan kepentingan yang dapat dipahami oleh aktor negara dan non-negara. Dengan adanya kesamaan kepentingan serta hubungan dua arah yang terbentuk dari program pendidikan internasional akan menghubungkan individu, institusi serta lembaga pemerintahan dari kedua negara yang terlibat untuk saling

bertukar ide, saling berhubungan dan berkolaborasi, dan juga saling mengimbangi dalam hal perkembangan teknologi di waktu yang bersamaan.²²

Pendidikan internasional sebagai instrument diplomasi publik telah mengalami evolusi dari masa ke masa beradaptasi dengan segala bentuk perkembangan dan kemajuan yang ada. Byrne dan Hall berpendapat bahwa tolak ukur keefektifan pendidikan internasional sebagai diplomasi publik dipengaruhi oleh daya tariknya bagi individu serta aspirasi dari individu untuk melangkah lintas batas dan budaya sebagai upaya dalam mencari dan memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta apakah individu tersebut mampu atau siap dalam menghadapi keberagaman pola pikir.²³ Konsep dasar dari *soft power* yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan dengan cara mempengaruhi pihak lain tanpa melibatkan tindakan pemaksaan sejalan dengan program pendidikan yang dilakukan oleh Australia melalui *New Colombo Plan* dikarenakan sebagai program pendidikan internasional, *New Colombo Plan* dapat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang terhadap Australia tanpa disertai dengan tindakan yang bersifat koersif. Selain itu, Byrne dan Hall juga berpendapat bahwa dengan menjadi negara penggagas *New Colombo Plan*, Australia dapat mencapai kepentingan nasionalnya yaitu dipandang sebagai negara yang dapat diandalkan oleh

²² Caitlin Byrne and Rebecca Hall. "International Education as Public Diplomacy". *Research Digest*, Vol. 3 (2014).

²³ *Ibid.*

negara di kawasan, negara aliansi, dan negara yang ramah walaupun didominasi oleh budaya Eropa di tengah-tengah kawasan Asia.²⁴

Artikel dari Maria Vaxevanidou yang berjudul *Education as Public Diplomacy: How to Build an International Image in Education* menjelaskan bahwa pendidikan internasional berkontribusi besar dalam upaya diplomasi publik suatu negara karena keuntungan yang diperoleh dari program pendidikan internasional dari aspek ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan investasi serta mempromosikan kebijakan luar negeri serta kepentingan komersil lainnya.²⁵ Pendidikan internasional juga dipandang sebagai metode yang cukup memberikan hasil signifikan sebagai sarana diplomasi publik sehingga telah diterapkan oleh negara-negara besar di dunia seperti Amerika Serikat, UK, Australia dan beberapa negara lainnya. Sistem pendidikan internasional juga membuat negara-negara tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas karena kualitas pendidikan yang baik serta kebudayaannya. Maria Vaxevanidou juga berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kuat diantara pengalaman yang diperoleh para siswa internasional dengan agenda *soft power* suatu negara dikarenakan pertukaran nilai serta kebudayaan yang terjadi dapat memperkuat hubungan kerjasama suatu negara dengan negara lainnya serta aspek pengaruh lainnya kepada negara lain dalam konteks dunia internasional.

²⁴ Caitlin Byrne and Rebecca Hall, op.cit. hal.419

²⁵ Maria Vaxevanidou, "Education as Public Diplomacy: How to Build an International Image in Education," *Journal of Media Critiques* Vol. 4, no. 14 (2018): 55.

Dalam tulisan ini, dipaparkan juga alasan mengapa pendidikan menjadi alat diplomasi publik yang penting bagi suatu negara. Dengan melalui program pendidikan internasional, memainkan peran sebagai *soft power* yang dimiliki negara, selain itu pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta Bahasa merupakan aspek-aspek dalam diplomasi publik. Suatu negara dengan *image* pendidikan yang berkualitas tinggi juga akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat khususnya pelajar dari mancanegara untuk menambah pengetahuan serta pengalaman baru dengan melakukan studi lintas negara.²⁶ Akan tetapi, negara juga perlu mengupayakan agar sistem pendidikan dan kualitasnya tetap terjaga dengan baik agar dampak dari diplomasi publik yang dilakukan melalui sistem pendidikan internasional juga bertahan dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menentukan target yang ingin dicapai setiap tahunnya terkait jumlah pelajar mancanegara yang ingin diserap, membangun proses strategis dengan mengukur negara mana sajakah yang akan dilibatkan dari segi pemangku kepentingan dan bentuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam kurun waktu program berjalan.²⁷

Sedangkan artikel jurnal dengan judul *Student Mobility from Australia to the Indo-Pacific via the New Colombo Plan* karya Ly Thi Tran dan Thao Thi Phong menjelaskan bahwa program *New Colombo Plan* telah membuka kesempatan bagi pelajar untuk turut berpartisipasi sebagai aktor dalam proses diplomasi publik

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Australia. Hal ini mengindikasikan bahwa pelajar memegang peran sebagai sarana mobilitas dan penyambung bagi negara asal kepada negara tujuan yang dalam hal ini merupakan Australia pada dunia internasional. *New Colombo Plan* yang berperan sebagai diplomasi pendidikan dikatakan penulis dapat memotivasi pelajar untuk bukan hanya sekedar mengejar tujuan pribadi yaitu memperoleh pendidikan dan pengalaman baru tetapi juga membawa nilai-nilai Australia keluar dari kawasan untuk membentuk cara pandang baru masyarakat internasional kepada Australia.²⁸

Ly Thi Thran dan Thao Thi Phuong juga memaparkan alasan mengapa pelajar memegang peran penting sebagai aktor diplomasi publik khususnya Australia melalui program *New Colombo Plan*. Melalui pendidikan internasional, pola pikir pelajar akan semakin terbuka akan nilai-nilai baru yang diterima dari kawasan dengan penganut ideologi serta nilai yang berbeda dari negara asal pelajar sehingga kepedulian serta sifat kritis akan semakin terasah yang kemudian diharapkan dapat bertukar nilai dengan pelajar lainnya. Selain itu, pelajar juga harus mampu menempatkan dirinya sebagai aktor diplomasi dan kesadaran akan identitas Australia harus dibawa dalam menghadapi pertukaran nilai yang terjadi sehingga siswa akan mampu melihat diri mereka sendiri sebagai individu dan warga negara Australia dalam interaksi dan keterhubungannya dengan kawasan diluar Australia. Kemudian pemikiran kritis di usia pelajar juga diperlukan dalam proses mempromosikan Australia dengan pendekatan

²⁸ Ly Thi Tran dan Thao Thi Phuong Vu, "Student Mobility from Australia to the Indo-Pacific via the New Colombo Plan," *HSEB: Higher Education in Southeast Asia and Beyond*, Issue No.3(2018)

pada negara lain untuk mengubah pelajar menjadi aktor diplomasi yang aktif dan mendukung proses diplomasi publik yang dilakukan.²⁹

Dari ketiga artikel jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa para peneliti tersebut melalui masing-masing setuju bahwa program pendidikan dapat menjadi sarana diplomasi publik yang strategis dikarenakan pertukaran pelajar dan program pendidikan merupakan jalur yang ramai sehingga dapat dinilai sebagai alat diplomasi publik yang akan membawa dampak signifikan bagi negara asal. *The New Colombo Plan* sebagai program yang dilakukan oleh Australia juga melibatkan pelajar sebagai aktor diplomasi publik sehingga akan membantu proses pembentukan cara pandang baru terhadap Australia. Kesamaan pandangan yang dirasakan oleh penulis secara spesifik tertuju pada artikel pertama yang ditulis oleh Caitlin Byrne dan Rebeca Hall yang berjudul “*International Education as Public Diplomacy*” yang kemudian akan digunakan sebagai panduan dari penelitian yang disusun. Byrne dan Hall dalam tulisannya menyebutkan bahwa pendidikan internasional dapat berkontribusi sebagai kebijakan luar negeri dan *soft power* sebuah negara, dalam hal ini Australia, dikarenakan sistem kerjanya yang melibatkan pelajar dan secara langsung memperoleh pengalaman selain sebagai aktor yang bertindak tetapi juga sekaligus memperoleh pengalaman dan ilmu terhadap kebudayaan negara tujuan dengan melalui intensitas interaksi yang terjadi dengan masyarakat setempat. Bagi penulis, pendidikan internasional memberikan dampak pada lingkungan sosial karena interaksi yang terjadi akan membantu

²⁹ *Ibid.*

membentuk opini dan pandangan pada publik terhadap masyarakat dan nilai-nilai sosial suatu negara yang dibutuhkan dalam upaya untuk memperkuat pengaruh dan hubungan baik dengan negara tersebut. Selain itu, pemahaman penulis terhadap diplomasi publik semakin terbantu melalui tulisan mengenai pendidikan internasional yang dapat dijadikan salah satu instrument diplomasi dikarenakan pergerakan pelajar yang sangat cepat untuk memperluas pendidikan di luar negaranya berperan sebagai aktor penting dalam upaya pendekatan dan pembentukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Serta, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada sebagai tujuan untuk mendukung literatur yang sudah ada.

1.5 Kerangka Pemikiran

Ilmu hubungan internasional didefinisikan sebagai sebuah subjek studi yang mempelajari tentang hubungan serta interaksi antar negara serta aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional (IGOs), organisasi non-pemerintah (NGOs), serta perusahaan multinasional (MNCs).³⁰ Adanya perkembangan dalam dunia internasional menyebabkan negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam menjalankan kepentingan nasional. Terdapat perluasan aktor dimana sebuah institusi, organisasi, maupun individu saat ini juga dapat turut mengambil peran untuk menjadi perwakilan sebuah negara tertentu. Selain itu, hubungan internasional saat ini tidak lagi berfokus

³⁰ Robert Jackson and George Sorenson, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches (5th Edition)*, Oxford University Press, 2013, 4

pada isu tradisional seperti perang maupun negara. Pergerakan dunia yang semakin modern mendorong munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim, lingkungan, budaya, terorisme, serta sosial sehingga muncul aktor lain yang turut terlibat seperti organisasi, institusi dan individu.

Salah satu konsep dalam ilmu hubungan internasional adalah politik luar negeri atau yang dikenal sebagai landasan dari penerapan kebijakan luar negeri. Politik Luar Negeri (polugri) merupakan sarana yang digunakan oleh negara dan pemerintah dalam menjalankan kebijakan serta politik internasionalnya. Christopher Hill dalam bukunya yang berjudul “*Foreign Policy in the Twenty-First Century*” menyebutkan bahwa polugri perlu dipandang sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mempertahankan dan memahami aktivitas internasional dimana negara terlibat.³¹ Dalam hal ini, pemahaman diperlukan agar negara dapat mengukur tingkat keberhasilan dari kepentingan yang akan dilakukan terhadap negara tujuan serta melakukan penyesuaian dengan lingkungan internasional. Untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara, maka politik luar negeri dan diplomasi harus berjalan beriringan. Kedua hal ini saling memiliki keterikatan karena memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan dan melindungi kepentingan negara.³² Politik luar negeri dapat dikatakan sebagai instrumen penggerak untuk menjalankan kepentingan negara,

³¹ Christopher Hill, 2016, *Foreign Policy in the Twenty-First Century*, ed. Ke-2, London: Palgrave

³² Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary* (California: ABC-CLIO, 1978)

tetapi tentu tidak bisa berjalan sendiri karena membutuhkan alat untuk menjalankan agenda yang ditetapkan. Oleh karena itu, diplomasi hadir untuk membantu politik luar negeri sebagai roda penggerak sehingga pada akhirnya kepentingan dapat tercapai.

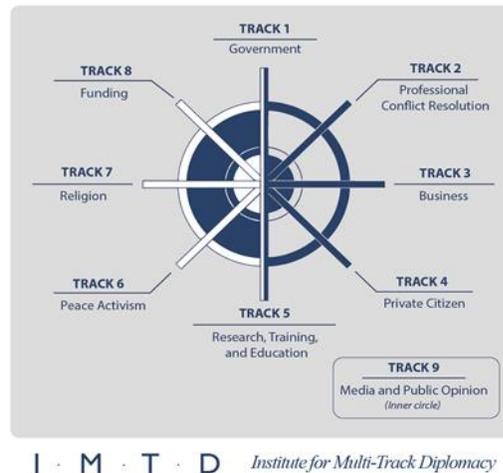
Sebagai implementasi dari politik luar negeri, negara melakukan diplomasi sebagai bentuk upaya untuk membangun dan menjaga relasi dengan negara lain. Hal ini dilakukan melalui perwakilan resmi yang bertugas untuk menyampaikan dan mengamankan kepentingan nasional dengan cara kunjungan antar negara maupun aktivitas-aktivitas lainnya.³³ Berdasarkan sudut pandang negara, diplomasi digunakan untuk menasihati, membentuk, dan menerapkan politik luar negeri.³⁴ Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, aktor diplomasi yang semula mengandalkan negara dan diplomat mengalami kemajuan dengan hadirnya aktor-aktor baru seperti individu dan media teknologi sehingga diplomasi tradisional perlu berjuang untuk mempertahankan relevansinya karena diplomasi modern tidak lagi mengenal waktu dan tempat.³⁵ Hal ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan peran masyarakat serta teknologi sebagai aktor baru dalam diplomasi modern.

³³ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal 4.

³⁴ R. P. Barston, *Modern Diplomacy: Fifth Edition*, (New York: Routledge, 2019), hal.1.

³⁵ Sukawarsini Djelantik, *op.cit.* hal.16.

Gambar 1.1 Bagan Diplomasi Multijalur



Sumber: <https://imtdsite.wordpress.com/about/what-is-multi-track-diplomacy/>

Klasifikasi aktor dalam pelaksanaan praktek diplomasi suatu negara terbagi menjadi dua jenis, bersifat formal dan informal. Diplomasi yang bersifat formal dilakukan oleh aktor negara langsung seperti pemerintah, diplomat, Menteri, maupun kepala negara langsung. Sedangkan diplomasi yang bersifat informal dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Dalam konsep diplomasi multijalur, dijelaskan bahwa terdapat sembilan elemen dalam sistem diplomasi yaitu pemerintah, profesional, sektor bisnis, individu atau masyarakat, lembaga pendidikan atau penelitian, para aktivis, sektor agama, pendanaan, serta media dan opini publik.³⁶

Dalam penelitian ini akan berfokus pada empat jalur; **Jalur 1** yakni pemerintah atau perwakilan Australia dengan pemerintah Indonesia yang berperan sebagai

³⁶ "What is Multi-Track Diplomacy?," *Institute of Multi-Track Diplomacy*, diakses pada 15 Juni 2021, <https://imtdsite.wordpress.com/about/what-is-multi-track-diplomacy/>

pembentuk kebijakan dan kinerja program. **Jalur 2** diperankan oleh organisasi non-pemerintah yang dibentuk oleh Australia sebagai wadah dan pelaksana kegiatan selama peserta berada di Indonesia. **Jalur 4** dengan individu atau masyarakat sebagai aktor dalam proses diplomasi yang dilakukan oleh pelajar Australia dan Indonesia serta masyarakat maupun pihak lain yang terlibat didalamnya. Kemudian **Jalur 9** yang diperankan oleh media dan opini publik. Media berperan sebagai penyedia informasi mengenai hal-hal terkait program atau kegiatan *The New Colombo Plan* serta wadah berkomunikasi atau pembentuk opini masyarakat.

Konsep diplomasi publik pertama kali diperkenalkan dan diterapkan pada tahun 1965 dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara dengan melalui pendekatan yang dilakukan oleh publik tanpa menggunakan cara yang bersifat memaksa atau dengan bantuan senjata dan kekuatan militer.³⁷ Diplomasi publik juga didefinisikan sebagai tindakan yang mempengaruhi masyarakat sebagai bentuk dari implementasi, eksekusi, dan tujuan utama kebijakan luar negeri suatu negara kepada negara lain yang kemudian akan membentuk hubungan kerjasama antar negara terlibat.³⁸ Melalui konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, diplomasi publik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *soft power* melakukan pendekatan pada negara

³⁷ Nicholas J. Cull, *Public Diplomacy: Taxonomies and Histories* (The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2008), 616:31.

³⁸ Antonio F. de Lima Jr., "The Role of International Educational Exchanges in Public Diplomacy," *Place Branding and Public Diplomacy* Vol. 3, no. 3(2007):236

melalui aspek-aspek seperti nilai, kebudayaan, norma, dan identitas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Tentu hal ini bertujuan agar negara memiliki citra positif dari perspektif publik. Melalui penjelasan lebih jauh, Nye juga memperkenalkan konsep dari *soft power* yakni gabungan dari *hard power* dan *soft power* untuk mencapai kepentingan nasional.³⁹ Dalam pelaksanaannya, beberapa tindakan yang biasanya dilakukan dalam proses diplomasi publik mencakup hal-hal seperti pembentukan opini masyarakat negara lain yang agendanya disusun oleh pemerintah⁴⁰. Pembentukan opini juga dilakukan dengan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang bersifat internasional serta pengaruh yang akan ditimbulkan pada kebijakan domestik untuk semakin mempererat hubungan negara, proses komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan oleh aktor seperti diplomat atau jurnalis serta komunikasi dengan media kebudayaan yang bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama dalam berbagai bidang untuk agenda jangka panjang.⁴¹ Berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh Joseph Nye, indikator hubungan bilateral yang baik dan erat secara teoritis dilihat dari diterimanya nilai norma atau identitas oleh masyarakat negara.

³⁹ Ratih Indraswari, "Soft Power Building Through International Education: Indonesia's KNB Scholarship Scheme," January 2016

⁴⁰ Elena Gurgu. "The Role of Public Diplomacy in International Relations in Full Process of Globalization". Annals of Spiru Haret University. 2016 Issue No. 2

⁴¹ "ASEAN, ROK Commit to Further Strengthen Partnership," ASEAN Secretariat News, October 2020, <https://asean.org/asean-rok-commit-strengthen-partnership/>

Dengan berperannya kebudayaan, masyarakat, serta aktor non-negara dalam proses diplomasi publik untuk mempengaruhi pihak lain telah menggeser pandangan diplomasi tradisional yang hanya melibatkan pemerintah dan kekerasan dalam memberikan pengaruh pada negara lain. Diplomasi publik juga telah membuktikan bahwa aktor-aktor non pemerintah seperti organisasi, masyarakat, kebudayaan, makanan khas, bahkan gaya hidup dapat memberikan pengaruh yang sama kuatnya seperti cara diplomasi tradisional. Hal ini terlihat dari bagaimana festival-festival kebudayaan dari negara lain semakin sering diadakan di berbagai negara sebagai bentuk bukti bahwa negara tersebut memiliki hubungan yang erat dengan negara dimana festival tersebut diadakan, atau terlihat dari bagaimana kebudayaan Korea pada saat ini semakin populer di kalangan muda. Nicholas Cull memaparkan bahwa pada dasarnya komponen diplomasi publik meliputi *listening*, advokasi, diplomasi kebudayaan, pertukaran (ide dan nilai-nilai), serta penyiaran berskala internasional.⁴² Konsep Edmund Gullion menyebutkan bahwa diplomasi publik meliputi hubungan internasional yang tidak lagi bersifat tradisional dikarenakan adanya keterlibatan dari pemerintah untuk membentuk opini publik pada negara lain, interaksi antar kelompok kepentingan pada dua negara dengan yang lainnya, penyampaian laporan terhadap

⁴² Nicholas J. Cull. "Public Diplomacy: Taxonomies and Histories". The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2008 616:31.

kegiatan internasional dan dampak yang dihasilkan pada kebijakan negara, dan komunikasi antara alat diplomasi negara.⁴³

Salah satu bentuk implementasi diplomasi publik ditunjukkan melalui pendidikan internasional yang kini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia. Diplomasi pendidikan didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi opini berdasarkan interaksi, pertukaran informasi dan kebudayaan, serta peluang kerjasama yang dapat dikategorikan sebagai *intangible asset* dari diplomasi publik.⁴⁴ Sistem pendidikan internasional telah digunakan oleh sebagian besar negara sebagai sumber investasi berkelanjutan untuk meningkatkan perdamaian serta pemahaman bersama sejak awal abad ke-20.⁴⁵ Pendidikan internasional dalam praktiknya dilakukan oleh pelajar yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam program pertukaran ke negara lain agar mereka dapat lebih memahami dan mengenal negara tujuan, meningkatkan pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan kebudayaan dari masyarakat setempat. Hal ini juga dipercaya dapat lebih meningkatkan hubungan yang baik dan stabil antara negara asal para pelajar dengan negara destinasi serta masyarakat sehingga kemudian akan berpengaruh pada implementasi kebijakan luar negeri.⁴⁶ Kata pertukaran dalam konteks pendidikan internasional mengacu pada kedua pihak yang

⁴³ Gyorgi Szondi. "Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences". Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'. 2008

⁴⁴ Caitlyn Byrne and Rebecca Hall, op.cit.hal.1

⁴⁵ Antonio F. de Lima Jr., op.cit.hal.234

⁴⁶ Antonio F. de Lima Jr., op.cit.hal.239

saling bertukar ilmu (pengajar dan pelajar), saling menerima dan memberi sesuatu (ilmu dan pengalaman), dan saling bertukar kebudayaan dan nilai-nilai. Pendidikan merupakan bagian dari diplomasi publik karena merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh negara untuk saling meningkatkan citra positif dan mencapai kebijakan luar negeri serta kepentingan nasionalnya. Dalam konsep diplomasi publik, ada citra atau gambaran tertentu yang ingin dibentuk oleh negara dalam benak masyarakat, yakni hal yang positif.

Hal inilah yang diinginkan negara melalui pendidikan internasional karena pelajar secara langsung terpapar kebudayaan dari negara yang mereka datangi sehingga akan membentuk opini tersendiri di kemudian hari. Adanya komponen timbal balik dari sebuah program pendidikan internasional menjadi alasan pemerintah untuk membuka peluang bagi pelajar untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih besar terhadap negara lain. Melalui pendidikan internasional, terdapat nilai yang dibawa oleh pelajar dari negara asal mereka kepada negara tujuan yang kemudian dibawa kembali dalam bentuk nilai dari negara tujuan kepada negara asal mereka sebagai bentuk aspek timbal balik.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digambarkan sebagai metode yang bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari suatu permasalahan,

situasi, atau sebuah realita sosial kemudian memaknakaninya.⁴⁷ Data-data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode studi kasus yang berfokus pada kegiatan *The New Colombo Plan* di Indonesia. Anne Marelli mendefinisikan studi kasus sebagai metode yang mendeskripsikan informasi mengenai sebuah fenomena atau kasus yang kemudian dikumpulkan dan diolah dan disampaikan dalam bentuk naratif.⁴⁸ Dengan adanya berbagai macam variabel, isu, dan permasalahan, metode ini membantu untuk dapat memahami suatu permasalahan karena banyaknya sudut pandang yang ada.

Untuk melakukan penelitian dengan metode studi kasus, beberapa tahap yang perlu dipersiapkan pertama yaitu *unit of analysis* yang berarti mengidentifikasi subjek atau kasus untuk dapat menyiapkan pertanyaan penelitian yang akan diajukan. Tahap kedua yaitu penentuan kasus yang akan diteliti serta memastikan kesiapan data yang akan diperlukan dikemudian hari. Tahap ketiga yaitu ruang lingkup penelitian untuk memastikan fokus permasalahan yang hanya akan berfokus pada pembahasan secara sempit atau luas. Tahap keempat yakni periode penelitian yang akan mempermudah fokus permasalahan karena sudah ditentukan rentang waktu yang akan dipakai sehingga tidak akan berdampak pada perluasan bahasan. Kemudian tahap terakhir adalah penentuan metode pengumpulan data dan sumber-sumber informasi yang dalam

⁴⁷ Patricia Leavy, "*The Oxford Handbook of Qualitative Research*," Oxford University Press, 2014, hal.2.

⁴⁸ Anne F. Marrelli, "*Collecting Data Through Case Studies*," The Performance Technologist's Toolbox, hal.39.

metode studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai cara, salah satunya melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁹ Untuk menganalisa, data yang diperoleh kemudian akan diolah dengan menggunakan konsep dan teori-teori untuk mendapatkan hasil penelitian dan kesimpulan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengolah informasi yang berasal dari referensi buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, serta media *online* serta sumber pendukung lainnya yang relevan dan kredibel. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk membantu memperoleh informasi-informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab pembahasan dengan sistematika:

Bab I berisi pendahuluan dengan pemaparan latar belakang masalah, identifikasi masalah dengan sub bagian berupa deskripsi masalah, pembatasan

⁴⁹ Anne F. Marrelli, *op.cit.*, hal. 40.

masalah, dan perumusan masalah. Kemudian berlanjut pada tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam sektor-sektor pemerintahan serta program *The New Colombo Plan* sejak awal berdiri, tujuan dibentuk, kegiatan, program yang dilakukan, dan negara-negara yang terlibat di dalamnya.

Bab III menganalisa upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Australia terhadap Indonesia melalui program kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang dibentuk oleh *The New Colombo Plan* dalam kurun waktu 2014-2019 dengan menggunakan konsep diplomasi multijalur dan pendidikan internasional.

Bab IV berisi kesimpulan hasil penelitian dari analisa keseluruhan